

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andi Hamzah, 2019, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- _____, 2020, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- _____, 2020, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi Sofyan, Nur Azisa, 2023, *Hukum Pidana Indonesia*, Makassar: Pustaka Pena Press.
- Nur Azisa, 2023, *Kompensasi dan Restitusi bagi Korban Tindak Pidana*, Makassar: Pustaka Pena Press.
- Barda Nawawi Arief, 2016, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- _____, 2020, *Hukum Pidana: Perkembangan dan Pembaruan*, Jakarta: Kencana.
- _____, 2021, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana.
- _____, 2021, *Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana.
- Eddy O.S. Hiariej, 2020, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Lilik Mulyadi, 2020, *Hukum Acara Pidana Indonesia: Suatu Tinjauan Khusus terhadap Teori dan Praktik*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- _____, 2021, *Hukum Pidana Perlindungan Korban*, Bandung: Alumni.
- _____, 2021, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung: Alumni.
- Namira Wulandari Nawawi, Nur Azisa, dan Syarif Saddam Rivanie Parawansa, 2023, *Kompensasi bagi Korban Tindak Pidana*, Bantul: Penerbit KBM Indonesia.
- Marlina, 2021, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana*, Bandung: Refika Aditama.
- Moeljatno, 2014, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- _____, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Muladi, 2008, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung: Alumni.

- _____, 2016, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: UNDIP Press.
- _____, 2020, *Hak Asasi Manusia dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- M. Yahya Harahap, 2020, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Roeslan Saleh, 2021, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Aksara Baru.
- Teguh Prasetyo, 2022, *Hukum Pidana*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sudarto, 2009, *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto.
- _____, 2010, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.
- _____, 2021, *Hukum Pidana I*, Bandung: Alumni.

Jurnal Ilmiah

- Ahadi, Nugroho, dkk., 2023, "Restitusi dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Utilitarianisme", *Jurnal Esensi Hukum*, Vol. 5 No. 2, hlm. 57-69.
- Lusia S. Hartanti, 2022, "Perlindungan Korban Kekerasan Seksual dalam Perspektif Hukum Pidana", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 29 No. 2, hlm. 489-508.
- Rena Yulia, 2018, "Kekerasan Seksual sebagai Kejahatan terhadap Martabat Manusia dalam Perspektif Hukum Pidana", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 48 No. 2, hlm. 145-160.
- Siti Aminah, 2022, "Delik Formil dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Menurut UU No. 12 Tahun 2022", *Jurnal Yudisial*, Vol. 15 No. 2, hlm. 245-248.
- _____, 2022, "Penafsiran Unsur Kekerasan Seksual Fisik dalam UU TPKS", *Jurnal Yudisial*, Vol. 15 No. 2, hlm. 251-254.
- Eko Sutrisno, 2023, "Tujuan Pemidanaan dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia", *Jurnal Sapientia et Virtus*, Vol. 8 No. 1, hlm. 8-16.
- _____, 2023, "Asas Keadilan dan Proporsionalitas dalam Pemidanaan", *Jurnal Sapientia et Virtus*, Vol. 8 No. 1, hlm. 15-618.
- Elfa Murdiana dan Alendra N.M. Rayhan, 2022, "Reformasi Hukum Pidana Kekerasan Seksual dari KUHP ke Keadilan Berbasis Korban", *Jurnal Supremasi Hukum*, hlm. 45-60.

,2022, "Pemidanaan Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak dalam Perspektif Keadilan Substantif", Jurnal Supremasi Hukum, hlm. 52-55.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Lembaran Negara RI Tahun 2022, Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6792.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara RI Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7346 K/Pid.Sus/2024.

Internet

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. *Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan 2021*. Jakarta: Komnas Perempuan, 2021.

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. *Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan 2022*. Jakarta: Komnas Perempuan, 2022.

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), 2021, Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan, Jakarta: Komnas Perempuan.

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), 2022, Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan, Jakarta: Komnas Perempuan.

Komnas Perempuan, 2023, Pedoman Perlindungan dan Pemulihan Korban Kekerasan Seksual, Jakarta: Komnas Perempuan.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, 2022, Urgensi UU TPKS, Jakarta: Kemen PPPA.

Lembaga Ketahanan Nasional RI, 2020, "Kekerasan Seksual sebagai Ancaman Ketertiban Sosial", Jurnal Lemhannas RI.

Lembaga Ketahanan Nasional RI, 2022, "Perlindungan Korban dalam Hukum Pidana Modern", Jurnal Lemhannas RI.